

PROSPEK HUBUNGAN AMERIKA SERIKAT DENGAN INDONESIA DAN NEGARA-NEGARA INDO-PASIFIK

Humphrey Wangke

Abstrak

Joe Biden sudah dipastikan memenangkan pemilihan presiden Amerika Serikat (AS) tahun 2020. Pekerjaan rumah yang harus dilakukannya adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat dunia terhadap kepemimpinan global AS. Artikel ini menganalisis hubungan AS di bawah Joe Biden dengan Indonesia dan negara-negara di kawasan Indo-Pasifik. Bagi Indonesia, kemenangan Biden merupakan peluang dan optimisme baru bahwa ketegangan di kawasan Indo-Pasifik akibat persaingan geopolitik antara AS-China bisa segera diatasi. Indo-Pasifik yang aman dan stabil sangat menguntungkan bagi Indonesia dan negara-negara di kawasan untuk meningkatkan kerja sama yang saling menguntungkan. Indonesia akan mendapatkan dampak positif dari kondisi seperti itu berupa peluang ekspor dan investasi yang lebih besar. Secara bilateral, Biden diharapkan akan meningkatkan perdagangan dan investasi dengan Indonesia mengingat Indonesia yang terlalu dekat dengan China sangat tidak diharapkan. Indonesia akan memperoleh keuntungan ekonomi dan politik bila tercipta keseimbangan ideal di kawasan karena Indonesia tidak didominasi oleh salah satu kekuatan baik AS maupun China.

Pendahuluan

Hasil pemilihan presiden Amerika Serikat (AS) tahun 2020 akhirnya diketahui setelah proses pemungutan dan penghitungan suara selesai. Calon presiden (capres) AS Joe Biden dari Partai Demokrat berhasil mengungguli capres petahana Donald Trump dari Partai Republik dengan perbandingan 306 berbanding 232 suara elektoral. Kedua capres sama-sama unggul di 25 negara bagian,

namun penghitungan *popular vote* menunjukkan Biden meraih 78 juta suara atau sekitar 50,8% sedangkan Trump meraih 72,8 juta suara atau 47,4%. Raihan suara Joe Biden tercatat sebagai suara nasional terbesar dalam sejarah pilpres AS. Atas keberhasilannya itu, banyak negara telah memberikan ucapan selamat kepada Joe Biden sebagai presiden baru AS. China yang menjadi musuh besar Trump selama 4 tahun terakhir juga telah memberikan ucapan



selamat kepada Biden pada tanggal 13 November 2020. Demikian pula dengan Presiden RI Joko Widodo, telah memberikan ucapan selamat kepada Biden.

Tugas berat sudah menanti pemerintahan Joe Biden, yaitu menata ulang dan memperbaiki warisan pemerintahan Trump. Tantangan terbesar yang akan dihadapi kepresidenan Biden dalam kebijakan luar negeri adalah mendapatkan kembali kepercayaan banyak negara termasuk sekutunya. Memulihkan kepercayaan dan rasa hormat di antara sekutunya akan relatif mudah, karena sebagian besar sekutu AS di Barat cenderung tunduk pada pemerintah AS mana pun. Tetapi berbeda ketika menyangkut mitra dan non-sekutu AS, apalagi lawannya. AS perlu memfokuskan pada upaya memulihkan kredibilitas dan membangun kembali kepercayaan di antara negara-negara. Dan ini akan membutuhkan perubahan yang signifikan dalam gaya, kebijakan dan sikap dari pembentukan kebijakan luar negeri AS.

Tulisan ini menganalisis prospek hubungan AS di bawah Joe Biden dengan Indonesia dan negara-negara di kawasan Indo-Pasifik. Topik ini penting karena ketika berkunjung ke Jakarta tahun 2015 sebagai wakil presiden Obama, Biden memuji Indonesia memiliki "nilai strategis", paling tidak karena statusnya sebagai salah satu negara dengan keragaman etnis di dunia, dan dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Selain itu, di dalam debat Partai Demokrat pada

bulan Desember tahun 2019, Biden menyatakan AS harus membangun aliansinya yang telah dihancurkan oleh Trump, seperti dengan Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Indonesia.

Mengingat pendekatan Biden yang penuh hormat dan empati terhadap diplomasi dan pengetahuannya yang mendalam tentang negara-negara, termasuk Indonesia, ada alasan yang kuat untuk beranggapan bahwa ia akan berusaha keras untuk memulihkan hubungan yang tegas namun positif dengan Indonesia dan negara-negara di kawasan Indo-Pasifik.

Kawasan Indo-Pasifik

Ketika Joe Biden mendeklarasikan diri sebagai presiden terpilih AS, banyak kebijakan di bawah kepresidenan Trump masih belum jelas, salah satunya adalah Strategi Indo-Pasifik. Pada akhir tahun 2017, Pemerintahan Trump meluncurkan konsep baru yang dikenal sebagai "Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka". Konsep ini dipandang sebagai penyimpangan dari yang dianjurkan oleh pendahulunya Barack Obama yaitu Penyeimbangan Kembali Asia-Pasifik. Ironisnya, Presiden Trump bukannya melobi mitra dan sekutu seperti yang dilakukan pemerintahan Obama, tetapi justru mengarahkan fokusnya pada ekonomi dan perdagangan dengan menggunakan tarif sebagai taktik utama untuk menekan China. Ini ditambah dengan penguatan kehadiran militer di wilayah Indo-Pasifik dan menggunakan isu hak asasi manusia sebagai alat politik untuk menekan China.

Meskipun demikian, terlepas dari perbedaan kata dan taktik,

tujuan fundamental dari Strategi Indo-Pasifik oleh Trump ataupun Penyeimbangan Kembali Asia-Pasifik oleh Obama adalah sama yaitu menahan kebangkitan China di kawasan. Dalam Platform Partai Demokrat 2020 yang dirilis pada bulan Oktober, tidak ada satupun kata "Indo-Pasifik". Namun, ketika berkunjung ke Pasifik, Biden mengatakan AS akan bekerja memperkuat hubungan dengan dan antara sekutu utama di kawasan yang telah konsisten dengan kebijakan pemerintah AS sebelumnya. Penghilangan istilah "Indo-Pasifik" tidak berarti Partai Demokrat tidak mementingkan kawasan atau akan menurunkan "Indo-Pasifik" ke "Asia-Pasifik."

Perbedaan besar antara pemerintahan Trump dengan pemerintahan Biden terletak pada cara pendekatannya. Bila Trump lebih menyukai pendekatan secara bilateral, maka Biden lebih memilih kerja sama yang bersifat multilateral. Keinginan Biden untuk mengembalikan AS sebagai negara anggota *Paris Agreement* merupakan salah satu contohnya. Biden mengatakan pemerintahannya akan membangun kerja sama dengan negara mitra dan sekutu serta negara-negara yang berpikiran sama di seluruh dunia.

Di kawasan Asia Pasifik, Pemerintahan Biden harus menata kembali masa depan kepemimpinan AS. Sejak Presiden Trump menarik AS keluar dari *Trans Pasific Partnership* (TPP) tahun 2017, ada dua perkembangan baru yang dihadapi oleh Biden. Pertama, 11 negara anggota TPP yang ditinggalkan Trump telah bernegosiasi ulang dan menandatangani kesepakatan

baru dengan nama Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (CPTPP) pada Maret 2018. Kedua, pada tanggal 15 November 2020, 15 negara termasuk China, Australia, Jepang, Korea Selatan serta negara-negara Asia Tenggara, telah menandatangani Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP). Terbentuknya dua kesepakatan ini telah menyingkirkan AS dari kawasan Asia Pasifik.

Melihat perkembangan seperti ini, Joe Biden menginginkan AS kembali bergabung dalam kesepakatan perdagangan TPP yang sekarang bernama Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (CPTPP). Biden, yang mendukung CPTPP sudah berjanji akan menegosiasikan kembali kesepakatan perdagangan ini jika terpilih. CPTPP mungkin bukanlah kesepakatan yang sempurna, tetapi dengan bergabung ke dalamnya akan mengembalikan kepemimpinan AS untuk mencapai Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Biden akan memperkuat kembali hubungan AS dengan negara mitra dan sekutunya di Asia Pasifik seperti Jepang, Korea Selatan dan Australia untuk bersatu membendung hegemoni China.

Baik CPTPP maupun RCEP bukanlah sekedar perjanjian perdagangan tetapi sudah menyangkut persaingan geopolitik antara AS dan China. Melalui CPTPP, AS akan kembali hadir di kawasan Asia Pasifik untuk membendung pengaruh China yang terus membesar. Sementara bagi China, RCEP menjadi wahana untuk memperkuat posisi dan pengaruh di kawasan Asia Pasifik. Dalam kondisi persaingan geopolitik antara

kedua negara itu, Indonesia harus dapat mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya. Bagi Indonesia, persaingan kedua negara merupakan peluang untuk dikelola secara baik melalui pendekatan secara bilateral maupun multilateral agar memberikan manfaat yang lebih besar bagi perdamaian di kawasan dan kepentingan nasional Indonesia.

Kepentingan Indonesia

Hubungan AS-Indonesia di bawah Joe Biden mungkin tidak akan mengalami perubahan yang signifikan. Kalaupun ada yang perlu disesuaikan hal tersebut lebih terletak pada penekanan isu. Berbeda dengan Trump, Biden yang berasal dari Demokrat akan lebih banyak mengusung isu hak asasi manusia, demokratisasi dan lingkungan hidup. Namun dengan perkembangan situasi geopolitik di kawasan Indo-Pasifik, AS tentunya tidak ingin melihat Indonesia terlalu dekat dengan China.

Indonesia berkepentingan dengan hasil Pilpres AS karena negara ini merupakan mitra dagang kedua terbesar Indonesia. Sebaliknya AS juga memerlukan Indonesia mengingat persaingan geopolitik dengan China mengharuskan mereka tidak boleh menjauh dari kawasan Asia Tenggara. Karena pertimbangan ini pula Presiden Trump pada 2 November 2020 akhirnya memberikan perpanjangan *Generalized System of Preferences* (GSP) yang membebaskan bea masuk pada banyak komoditas ekspor Indonesia ke AS. Padahal pada Februari tahun 2020 Trump memutuskan untuk meningkatkan

status Indonesia sebagai negara maju yang berarti tidak boleh lagi memperoleh fasilitas keringanan bea masuk. Perubahan sikap Trump ini tidak terlepas dari kepentingan geopolitik AS di kawasan Indo-Pasifik.

Memperkuat perekonomian negara-negara yang menjadi mitra di masa depan telah lama menjadi bagian dari strategi *containment* AS setelah kalah dalam peperangan di Vietnam. Namun, sekarang AS harus menyadari bahwa dalam melakukan pengepungan ekonomi terhadap China, China dapat menunjukkan kepada negara-negara di kawasan tentang pendirian dan gagasan kebijakannya terkait dengan globalisasi dan perdagangan bebas, dan meningkatkan upaya mempromosikan integrasi dengan negara-negara kawasan termasuk sekutu dan mitra AS. Ini juga yang mempercepat China mempromosikan mekanisme regional seperti Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional dengan ASEAN.

Karena itu, Indonesia harus secepatnya memanfaatkan fasilitas GSP mengingat AS merupakan negara tujuan ekspor nonmigas terbesar kedua Indonesia setelah China. Indonesia banyak dirugikan dari kondisi perang dagang antara AS dan China karena menimbulkan sentimen negatif bagi Indonesia, mengingat semangat proteksionisme atau pengetatan perdagangan kepada negara lain yang diberlakukan Trump telah merugikan kepentingan ekonomi Indonesia. Hal tersebut terlihat dari lesunya kinerja ekspor Indonesia bahkan sebelum pandemi akibat rendahnya permintaan bahan baku

dari China dan ekspor langsung ke AS. Sepanjang tahun 2019 ekspor Indonesia secara keseluruhan hanya mencapai US\$167,53 miliar, turun tajam sebesar 6,94% dibandingkan pencapaian tahun sebelumnya sebesar US\$180,01 miliar.

Indonesia berharap Joe Biden mampu memberikan ketenangan dan kepastian geopolitik, khususnya di kawasan Indo-Pasifik. Indonesia sangat membutuhkan kepastian politik dan stabilitas, terutama antara China dan AS. Apabila hubungan geopolitik antara China dan AS berhasil, maka hal ini akan berdampak pada kepastian dan ketenangan negara, tidak hanya bagi Indonesia tetapi juga bagi kawasan Indo-Pasifik hingga ASEAN. Indonesia bagian dari ekonomi ASEAN, kalau Indo-Pasifik aman maka kawasan ASEAN akan aman. Jika Indo-Pasifik aman, maka pertumbuhan ekonomi akan terjadi dan yang terpenting ada optimisme. Hal ini pula yang menjadi alasan mengapa banyak pihak di Indonesia mendukung Joe Biden sebagai Presiden AS.

Penutup

Naiknya Joe Biden sebagai Presiden AS yang baru diharapkan akan mengubah gaya kepemimpinan AS sekaligus memperbaiki hubungan dengan negara-negara yang selama ini dirugikan oleh kepemimpinan Trump. Bagi Indonesia dan negara-negara di kawasan Indo-Pasifik, naiknya Biden akan memberi peluang dan optimisme baru bahwa kerja sama multilateral yang selama ini telah menjadikan AS sebagai negara dominan di dunia, akan menjadi prioritas.

Di bawah Joe Biden, diharapkan AS tidak lagi menjadi

sumber inspirasi bagi elemen masyarakat di berbagai negara untuk membangkitkan semangat ekstrim kanan dan rasialisme. AS di bawah Joe Biden diharapkan akan mengembalikan nilai-nilai untuk menghormati pluralisme, hak asasi manusia, dan tidak merendahkan suatu bangsa berikut peradabannya. Indonesia terutama anggota DPR RI, harus berhati-hati dengan kemungkinan Presiden Biden akan menjadikan isu lingkungan hidup, HAM dan demokrasi sebagai basis hubungan bilateral.

Referensi

- “Biden dan Prospek Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik”, *Kompas*, 12 November 2020, hal. 8.
- “Biden Focus on Economy as Trump Refuses to Quit”, *The Jakarta Post*, 17 November 2020, hal. 1.
- “Biden Plans Move into White House as Trump Clings to Hope”, *The Jakarta Post*, 12 November 2020, hal. 4.
- “Biden Siap Ambil Alih Kekuasaan”, *Media Indonesia*, 12 November 2020, hal. 1
- Juwana, Hikmahanto. 2020. “Selamat Datang Kembali Amerika”, *Kompas*, 12 November 2020, hal. 6.
- Keliat, Makmur. 2020. “Warisan Pemulihan Ekonomi Trump”, *Kompas*, 14 November 2020, hal. 6.
- Kuncoro, Ari. 2020. “Era Joe Biden dan Indonesia”, *Kompas*, 16 November 2020, hal. 6.
- Munjid, Achmad. 2020. “Pilpres AS 2020 dan Tikungan Tajam Demokrasi”, *Kompas*, 12 November 2020, hal. 6.
- “Pasar Senang Biden Menang”, *Media Indonesia*, 10 November 2020, hal. 1.

Riady, John. 2020. "South East Asia has Won Along with Biden", *The Jakarta Post*, 16 November 2020, hal. 6.

"RI Looks to Post-Trump Era Ahead of ASEAN Summit", *The Jakarta Post*, 12 November 2020, hal. 1.

Sukma, Rizal. 2020. "American After Trump: The Return of Decency?", *The Jakarta Post*, 11 November 2020, hal. 2.

"US Election Officials, "No Evidence" of Compromised Votes", *The Jakarta Post*, 14 November 2020, hal. 1.

Zain, Winarno. 2020. "How Much Can We Expect from Biden's Trade Policy?", *The Jakarta Post*, 11 November 2020, hal. 6.



Humphrey Wangke
humphrey.wangke@dpr.go.id

Dr. Humphrey Wangke, M.Si. Menyelesaikan Pendidikan S1 Hubungan Internasional tahun 1988 di FISIP Universitas Jember dan pendidikan S2 tahun 1998 pada Program Kajian Wilayah Amerika Universitas Indonesia. Pada tahun 2018 menyelesaikan studi S3 di Sekolah Ilmu Lingkungan (SIL) Universitas Indonesia. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Utama Kepakaran Isu-Isu politik Strategis Pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Beberapa Karya tulis yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku, antara lain: "Diplomasi Indonesia dan Pembangunan Konektivitas Maritim (2018)", "Kerjasama Indonesia-Malaysia dalam Pengelolaan Perbatasan di Kalimantan (2017)", "Solving the Problem of Illegal Logging through the Implementation of the Model of Partnership Between Balai TNK and the Local Community (The Case Study of Illegal Logging in TNK, East Kalimantan (2017)", "The Management of Kutai National Park through the Multi-stakeholder Partnership (2017)".

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
 ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.